

## Analisis Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun

Andri Wijanarko  
Universitas Trunojoyo Madura

### Abstract

*The Important part in the context of development planning is an evaluation of the development process. The evaluation is conducted to obtain feedback that can be recognized early divergence aberration implementation of development plans, and then can be formulated remedial measures are well targeted and timely. Evaluation can be done using several approaches as needed. This is no exception with Madiunn County, which consists of 206 administrative villages / urban (198 villages and 8 villages) are scattered in 15 districts.*

*Based on the results of research, (A) SSWP 1 has a total population of 2012 amid the highest reaching 279 404. This is a potential for the development of human resources and labor potential in the labor market structure. (B) The existence of inequality and the number of junior high school graduates who are still concentrated in SSWP 1 and 3. (C) In the event that the number of poor people, it turns out SSWP 1 which has the highest number of population also has the highest number of poor people. Not less than 2,521 population recorded very poor; 7,931 poor and 7,573 near-poor population. (D) Based on the data values in the formal industrial investments throughout SSWP, it appears that SSWP 1 has the highest number with a total value of Rp 25,747,183,000, particularly in Sub Pilangkenceng amounting to Rp 6,958,750,000.*

*Keywords : Spatial development, SSWP, population, poverty, investment*

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan

dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara komprehensif.

Bagian penting dalam konteks perencanaan pembangunan adalah evaluasi atas pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dapat

dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sesuai kebutuhan. Setiap pendekatan biasanya memiliki indikator yang berbeda-beda.

Hal tersebut tidak terkecuali dengan Kabupaten Madiun, yang secara administratif terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan. Membutuhkan konsep dan pendekatan evaluasi pembangunan yang tepat, agar arah dan orientasi pembangunan sesuai dengan rencana. Sebagaimana dokumen RTRW Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan hirarki perkotaan masing-masing. Penentuan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dilakukan dengan pendekatan homogenitas, pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, dibuat sesuai dengan hirarki perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap wilayah pendukung.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk; (1) Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional. (2) Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Madiun. (3) Mendukung rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Madiun yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah Propinsi.

Terkait dengan hal tersebut, maka secara otomatis arah dan orientasi pembangunan di Kabupaten Madiun akan dikembangkan sesuai dengan arahan sebagaimana tertuang dalam dokumen RT/RW tersebut. Dengan demikian, konsep evaluasi kinerja pembangunan juga harus dilakukan dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di setiap Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Berpijak pada

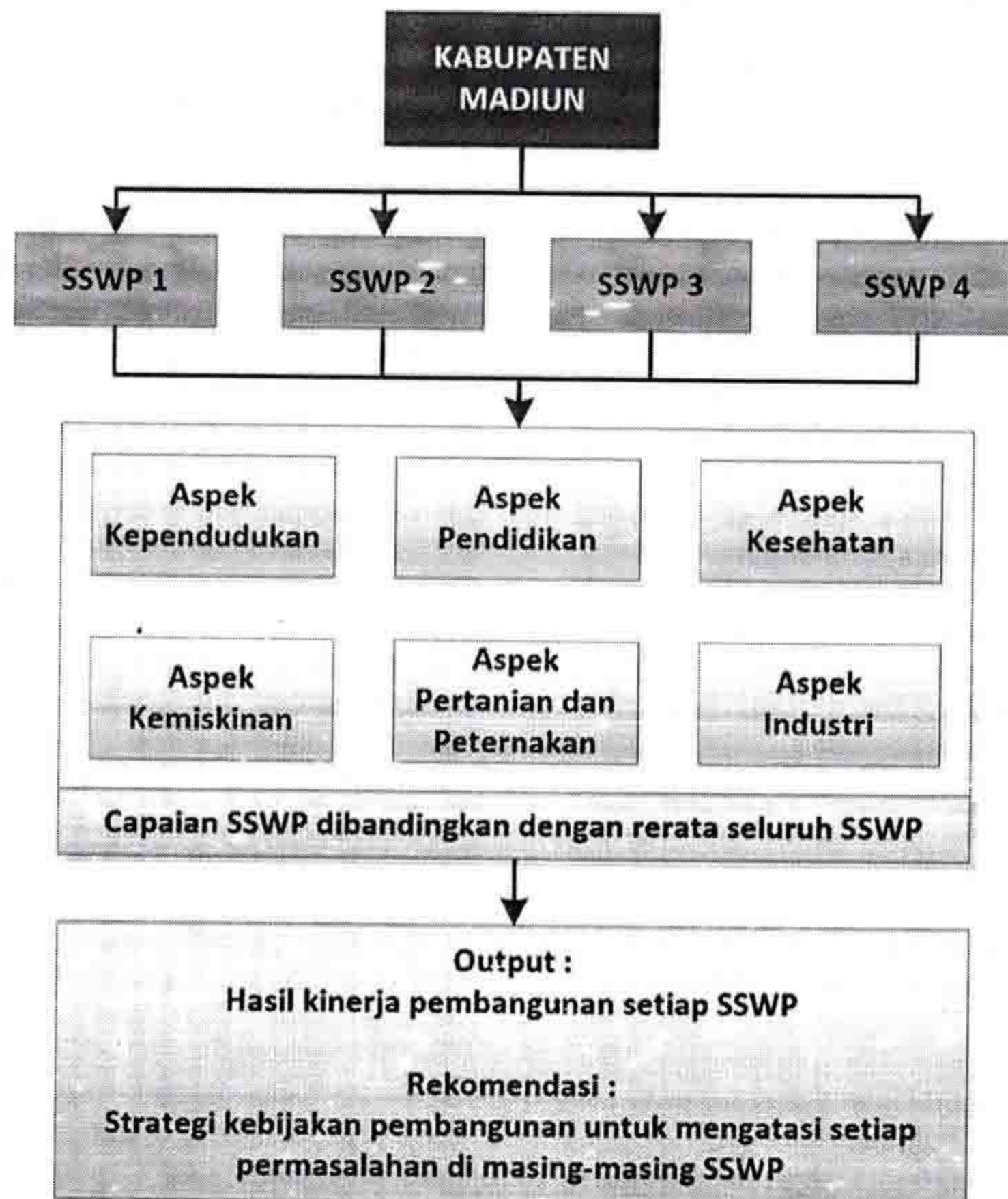
argumentasi tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan Analisis Kinerja Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun, guna mengetahui tingkat capaian pembangunan, hambatan/kendala yang dihadapi serta upaya yang perlu dilakukan di setiap SSWP dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Madiun. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam Analisis Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah capaian kinerja Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun?
2. Strategi pembangunan apa yang perlu dilakukan di setiap wilayah pengembangan, agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan optimal

Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana capaian kinerja Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pencapaian kinerja pembangunan berbasis spasial di Kabupaten Madiun.
3. Merumuskan strategi pembangunan dan upaya yang perlu dilakukan di setiap wilayah pengembangan, agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Merumuskan Mengacu pada latar belakang dan tujuan dalam Analisis Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun ini, maka rumusan kerangka konseptualnya sebagaimana disampaikan dalam ragam di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### LANDASAN TEORI

#### Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan pembangunan mempunyai peranan yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena antara perencanaan, pembangunan serta pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai apabila pembangunan ekonomi tidak berjalan dan pembangunan ekonomi sulit berjalan dengan baik apabila pembangunan ekonomi tersebut tidak direncanakan dan disusun

dengan baik. Demikian penting peranan perencanaan pembangunan sehingga Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 1999) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Definisi perencanaan pembangunan yang disebutkan Conyers dan Hills tersebut apabila dianalisis akan menimbulkan beberapa penekanan, yaitu perencanaan merupakan suatu

proses yang berkesinambungan, dalam artian suatu proses yang berjalan bersama dengan proses yang lain. Hal berikutnya adalah adanya keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya, penekanannya terdapat pada munculnya keputusan atas pilihan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pilihan yang dilakukan haruslah suatu keputusan yang tepat karena apabila tidak tepat maka pelaksanaan pembangunan tidak akan optimal.

Perencanaan pembangunan dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan. Pembagian kategori tersebut muncul karena di antara perencanaan pembangunan memiliki karakteristik yang berbeda. Kadariah membagi perencanaan pembangunan dalam tiga kategori, yaitu (Kadariah, 1982):

- a) Rencana perspektif atau rencana jangka panjang, yang biasanya menunjukkan arah umum perkembangan perekonomian nasional yang dikehendaki dan menunjukkan perubahan struktural yang penting, dengan jangka waktu 20 sampai 30 tahun;
- b) Rencana jangka menengah (*medium term plans*), antara 4 sampai 6 tahun, tergantung keperluan administratif atau politis namun biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek-proyek penting
- c) Rencana jangka pendek (*short term plans*), biasanya merupakan rencana tahunan (*annual plans*) yang dicerminkan dalam budget pemerintah. Rencana ini dapat juga mempunyai periode 2 sampai 3 tahun

Pembangunan ekonomi merupakan tindak lanjut perencanaan pembangunan. Perencanaan yang telah disusun dengan rapi dan penuh dengan

perhitungan akan dilanjutkan dengan proses pembangunan. Pembangunan ekonomi (*economic development*) dapat dipandang sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999). Pengertian pembangunan ekonomi menurut Lincoln Arsyad tersebut menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya suatu proses yang menyebabkan naiknya pendapatan per kapita saja namun juga merupakan proses yang menyebabkan perbaikan sistem kelembagaan suatu masyarakat.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi beberapa orang dianggap sebagai suatu hal yang sama atau identik, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Sadono Sukirno adalah salah satu ahli ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut. Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai (Sukirno, 1985): (i) Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk, atau (ii) perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional.

Berangkat dari definisi pembangunan ekonomi tersebut maka pertambahan GDP yang melebihi tingkat pertambahan penduduk tanpa diikuti dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonomi suatu masyarakat belum dapat dikategorikan sebagai proses pembangunan ekonomi. Todaro menyimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat, melalui suatu kombinasi

berbagai proses sosial dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen kehidupan yang lebih baik tersebut, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai sasaran (Todaro, 2000):

1. *To increase the availability and widen the distributed of basic life sustaining goods such as food, shelter, health and protection.*
2. *To raise levels of living, including, in addition of higher incomes, the provision of more jobs, better education, and greater attention to cultural and humanistic values, all of which will serve not only to enhance material well-being but also to generate individual and nation self-esteem.*
3. *To expand the range of economic and social choices available to individuals and nations by freeing them from servitude and dependence not only in relation to other people and nation states but also to the forces of ignorance and human misery.*

Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok, peningkatan taraf hidup dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa merupakan inti dari sasaran pembangunan ekonomi menurut Todaro.

Surjadi (1983) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar. Sementara itu Bryant dan White (dalam Talizidduhu, 1987) mengemukakan bahwa pem-bangunan

merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mem-pengaruhi masa depan”. Dan terdapat lima implikasi utama dari pendefinisian pembangunan tersebut, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan ke-merataan nilai dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dengan pihak lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

### **Investasi**

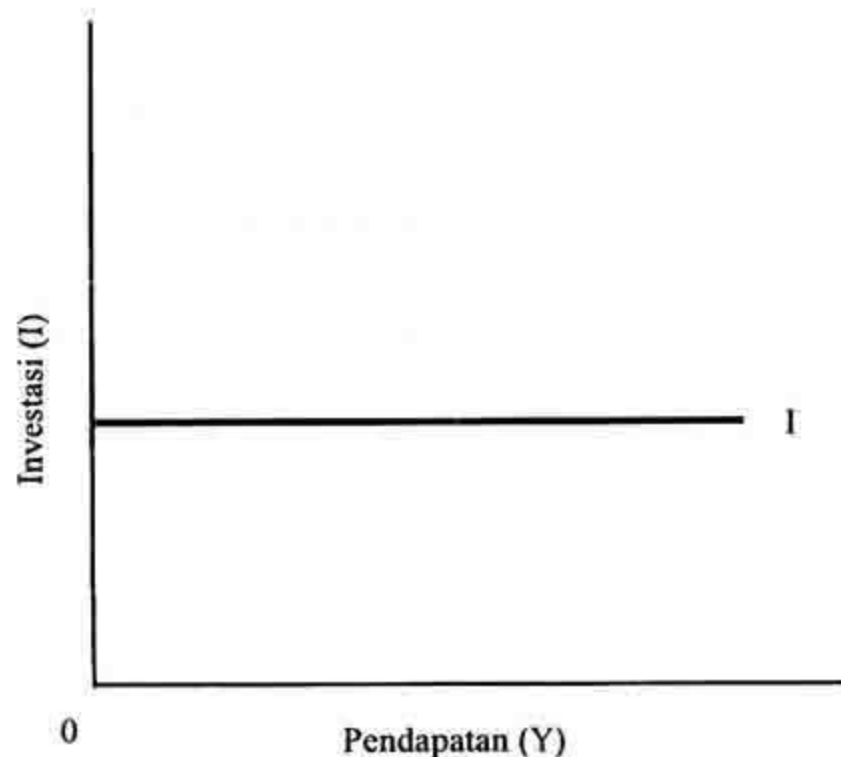
Investasi merupakan kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Sadono Sukirno menekankan dampak investasi dalam suatu perekonomian berupa produksi barang dan jasa dapat dirasakan pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain bahwa pengaruh investasi dapat dirasakan setelah investasi tersebut dilaksanakan.

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2000)

Investasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Suherman Rosyidi membagi investasi menjadi empat kategori yang masing-masing terdiri dari dua jenis investasi, yaitu (Rosyidi, 1996) :

#### A. *Autonomous Investment* dan *Induced Investment*

*Autonomous investment* atau investasi otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi dapat berubah oleh adanya perubahan faktor di luar pendapatan, misalnya tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, ekspektasi para pengusaha dan sebagainya. Sifat *autonomous investment* yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan menyebabkan bentuk fungsi *autonomous investment* berupa garis lurus horizontal seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2. Pendapatan yang digambarkan pada sumbu datar grafik tersebut tidak berpengaruh terhadap investasi.

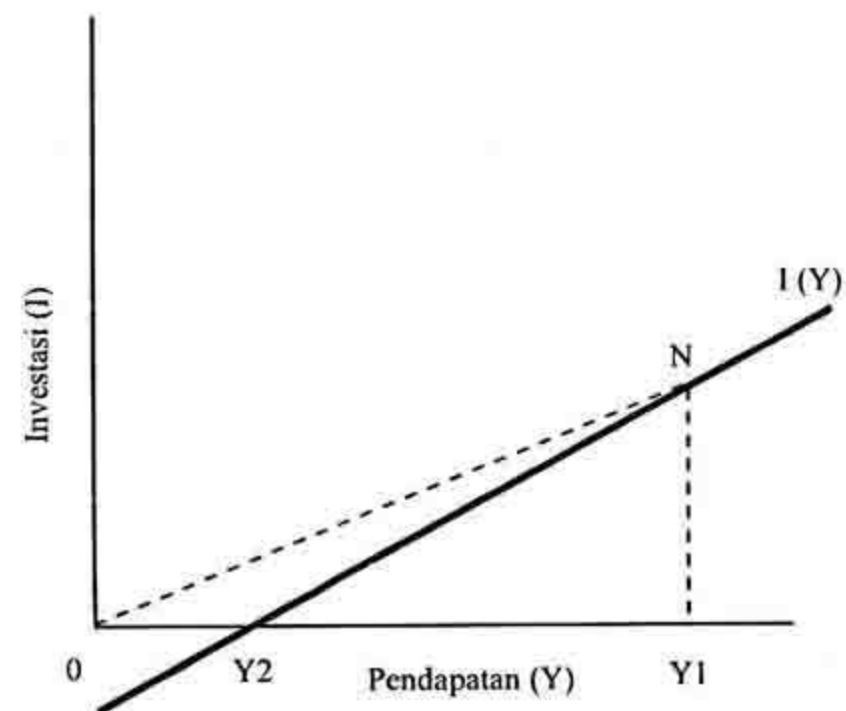


Sumber : Rosyidi, Suherman, 1996.

Gambar 2. *Autonomous Investment*

*Induced investment* atau investasi terimbas adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Karena sifatnya yang dipengaruhi oleh pendapatan maka bentuk fungsi *induced investment* be-

rupa garis yang condong ke kanan atas untuk menyatakan bahwa antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan positif, sebagaimana hubungan yang ada diantara konsumsi dan tabungan di satu pihak, dengan pendapatan dipihak lain.



Sumber : Rosyidi, Suherman, 1996.

Gambar 3. *Induced Investment*

Gambar 3 memberikan keterangan bahwa fungsi  $I(Y)$  dilukiskan memotong sumbu  $Y$  dari bawah yang menyatakan bahwa terdapat investasi negatif pada tingkat pendapatan yang rendah (dalam Gambar 3 digambarkan tingkat pendapatan nol hingga  $OY_2$ ). Dalam kondisi seperti itu, para pengusaha berpendapat bahwa rendahnya tingkat pendapatan nasional (kurang atau sama dengan  $OY_2$ ) justru akan membawa bencana bagi kehidupan usaha mereka di masa datang.

Hal ini mengakibatkan para pengusaha menjual barang investasi yang telah dimiliki, berkurangnya barang investasi yang dimiliki para pengusaha disebut *disinvestment* atau investasi negatif.

#### B. *Public Investment* dan *Private Investment*

*Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua, kecamatan maupun desa. Dengan kata lain *public investment* tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersifat personal. Investasi ini bersifat impersonal, dalam arti kata resmi. Pemerintah dalam menentukan volume *public investment* lebih banyak mempertimbangkan pelayanan atau penciptaan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

*Private investment* adalah kebalikan dari *public investment* yaitu investasi yang dilaksanakan oleh swasta. Di dalam *private investment* unsur-unsur seperti keuntungan yang akan diperoleh masa depan penjualan, dan sebagainya memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan volume investasi.

#### C. *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*

*Domestic investment* adalah investasi atau penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. Suatu negara yang memiliki banyak faktor produksi alam (*natural resources*) dan atau faktor produksi tenaga manusia (*human resources*) namun tidak memiliki faktor produksi modal (*capital*) yang cukup untuk mengolah sumber-sumber yang dimiliki akan mengundang modal asing supaya sumber daya yang terdapat di dalam negeri dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

#### D. *Gross Investment* dan *Net Investment*

*Gross investment* atau investasi bruto adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Investasi bruto dapat bernilai negatif, sehingga yang dimaksud dengan disini adalah semua jenis investasi yang dilaksanakan di suatu negara, tidak peduli jenis investasi apa saja yang dilaksanakan.

*Net investment* atau investasi netto adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Penyusutan adalah hilangnya nilai sebagian (atau seluruhnya) benda modal atau barang investasi sebagai akibat digunakannya barang tersebut dalam proses produksi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan dari data hasil pengukuran berdasarkan variabel penelitian yang ada. Jenis penelitian ini dirancang untuk mengetahui obyek tertentu, dan fokus pada satu permasalahan saja. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk melakukan pengujian terhadap teori, konsep atau hukum yang telah ada sebelumnya. Kemudian metode deskriptif adalah teknik untuk menyajikan dan menggambarkan berbagai data dan informasi yang diperoleh, guna mengetahui keterkaitan secara teknis dalam rangka untuk mengambil sebuah kesimpulan. Perpaduan metode kuantitatif-deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan analisis kinerja pembangunan berbasis spasial di Kabupaten Madiun.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Kab Madiun, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan sumber lain yang relevan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan Analisis Pembangunan Berbasis Spasial di Kabupaten Madiun ini, meliputi :

- a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca literatur yang

- berkaitan dengan permasalahan dan judul terkait.
- b) Studi dokumenter, yaitu penggalian data yang bersumber dari dokumen-dokumen perencanaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun.
  - c) Wawancara (*interview*), yaitu teknik untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan mendalam dan intensif dengan pihak SKPD secara langsung baik dengan pejabat maupun pihak staf. Bertujuan untuk mengetahui berbagai capaian kinerja pembangunan berbasis spasial sesuai ruang lingkup masing-masing SKPD.
  - d) *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi terbatas dengan berbagai pihak yang kompeten dan terkait, antara lain SKPD terkait.
  - e) *Browsing Data* dari sumber-sumber yang relevan

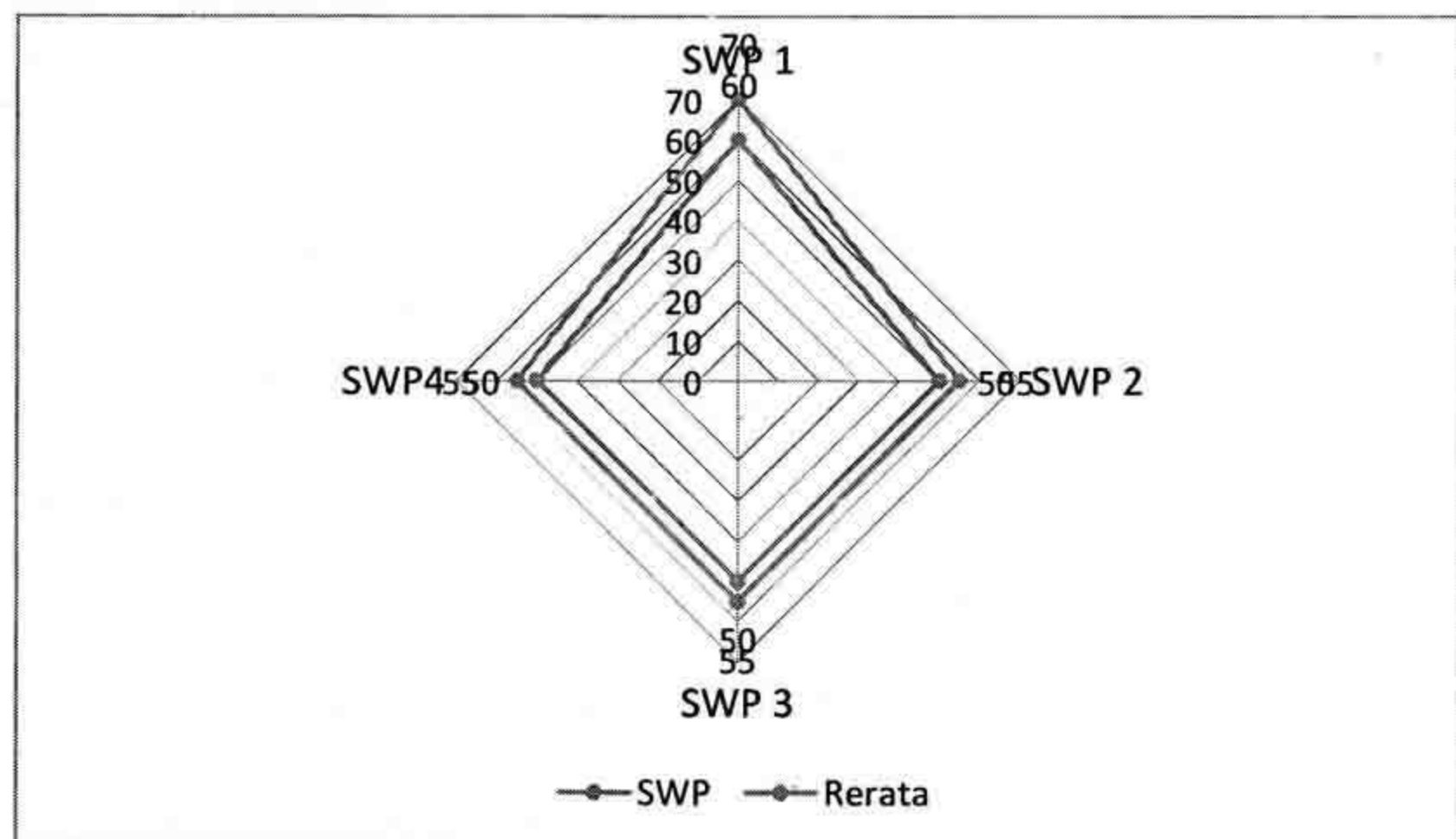
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu teknik analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan perhitungan capaian kinerja pada masing-masing Sub Satuan Wilayah Pembangunan SSWP yang berada di wilayah Kabupaten Madiun.

Teknik perhitungan dengan menggunakan beberapa indikator pembangunan sebagai berikut :

- a) Aspek Kependudukan
- b) Aspek Pendidikan
- c) Aspek Kesehatan
- d) Aspek Sosial (Kemiskinan)
- e) Aspek Pertanian dan Peternakan
- f) Aspek Industri

Kelima indikator di tingkat SSWP tersebut selanjutnya akan dikomparasikan dengan nilai capaian rata-rata di tingkat Kabupaten Madiun dan secara grafis akan disajikan dalam bentuk diagram radar seperti dibawah ini.

#### Teknik Analisis Data



Gambar 4. Diagram Radar



Kelebihan penggunaan diagram radar adalah dapat diketahui bagaimana prosesi capaian masing-masing SSWP di Kabupaten Madiun bila dibandingkan dengan rata-rata di tingkat kabupaten dengan sangat mudah, sehingga dapat diidentifikasi indikator yang masih membutuhkan perhatian (bilamana dibawah rata-rata capaian kinerja tingkat kabupaten).

### Metode Analisis Deskriptif.

Teknik analisis deskriptif sangat diperlukan untuk menganalisis variabel-variabel kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap tujuan analisis. Antara lain untuk menggali hambatan /kendala selama pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten Madiun.

Sumber informasi tersebut adalah para *Policy Maker* yang terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Madiun, Kepala Bappeda Kabupaten Madiun. Teknis pengumpulan data dilakukan secara tidak terstruktur dan terbuka sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

- Reduksi Data. Setelah melakukan pengumpulan data, mempelajari data tersebut dan merangkum. Selama merangkum peneliti tetap menjaga keberadaan pernyataan informan. Kemudian data dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian data yang tidak diperlukan akan tampak, sehingga peneliti menghilangkan (mereduksi) data yang tidak perlu dan menggabungkan data yang signifikan.
- Sajian Data. Data yang telah disaring pada proses reduksi data ditampilkan dan disusun dengan urutan; mulai dari ragam permasalahan dan dinamika

yang terjadi, kebijakan yang pernah ditempuh oleh pemerintah maupun *stake holders* Bidang Kesehatan dan Pendidikan sampai pada penjabaran tentang aspek dan faktor pendukung dan faktor penghambat atas pelaksanaan program yang pernah dilakukan.

- Tahap Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari analisis data yang di susun dan diuraikan berdasarkan bagiannya. Dalam bagian ini akan disimpulkan hal-hal terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sehingga sesuai dengan tujuan analisis.

### Lokasi Penelitian

Lokasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berbasis Spasial Kabupaten Madiun ini meliputi beberapa SKPD yang terkait dengan lima indikator utama yang selanjutnya akan dielaborasi pada masing-masing SSWP di Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah :

1. **SSWP – I:** kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi: Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan dan Kecamatan Balerejo.
2. **SSWP – II:** kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman,

meliputi: Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Desa Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglandung).

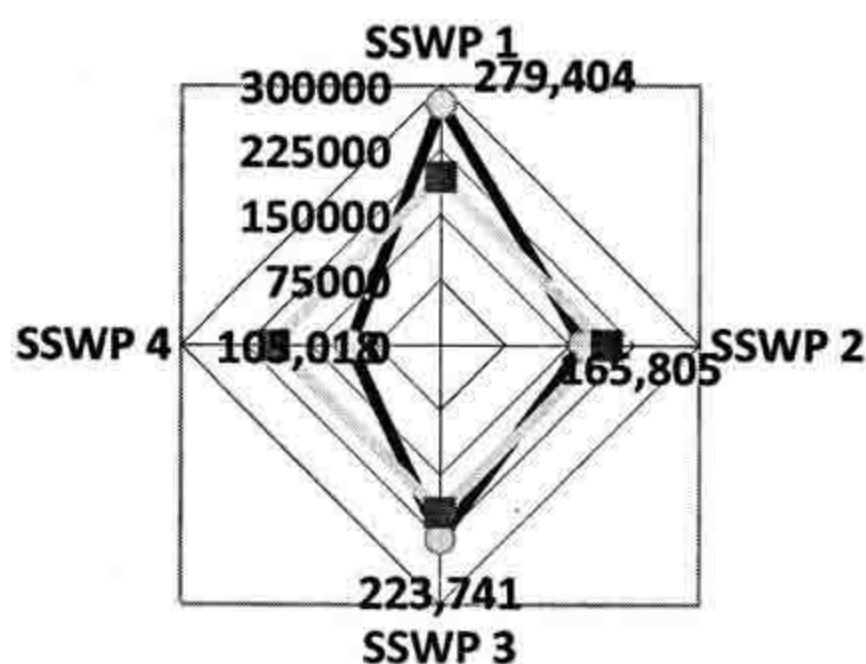
3. **SSWP – III:** kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan *agroforestry*, di Kabupaten Madiun, meliputi: Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kebonsari.
4. **SSWP – IV:** kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun (*Ecological City*) meliputi: Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah).

#### ANALISIS HASIL PENELITIAN

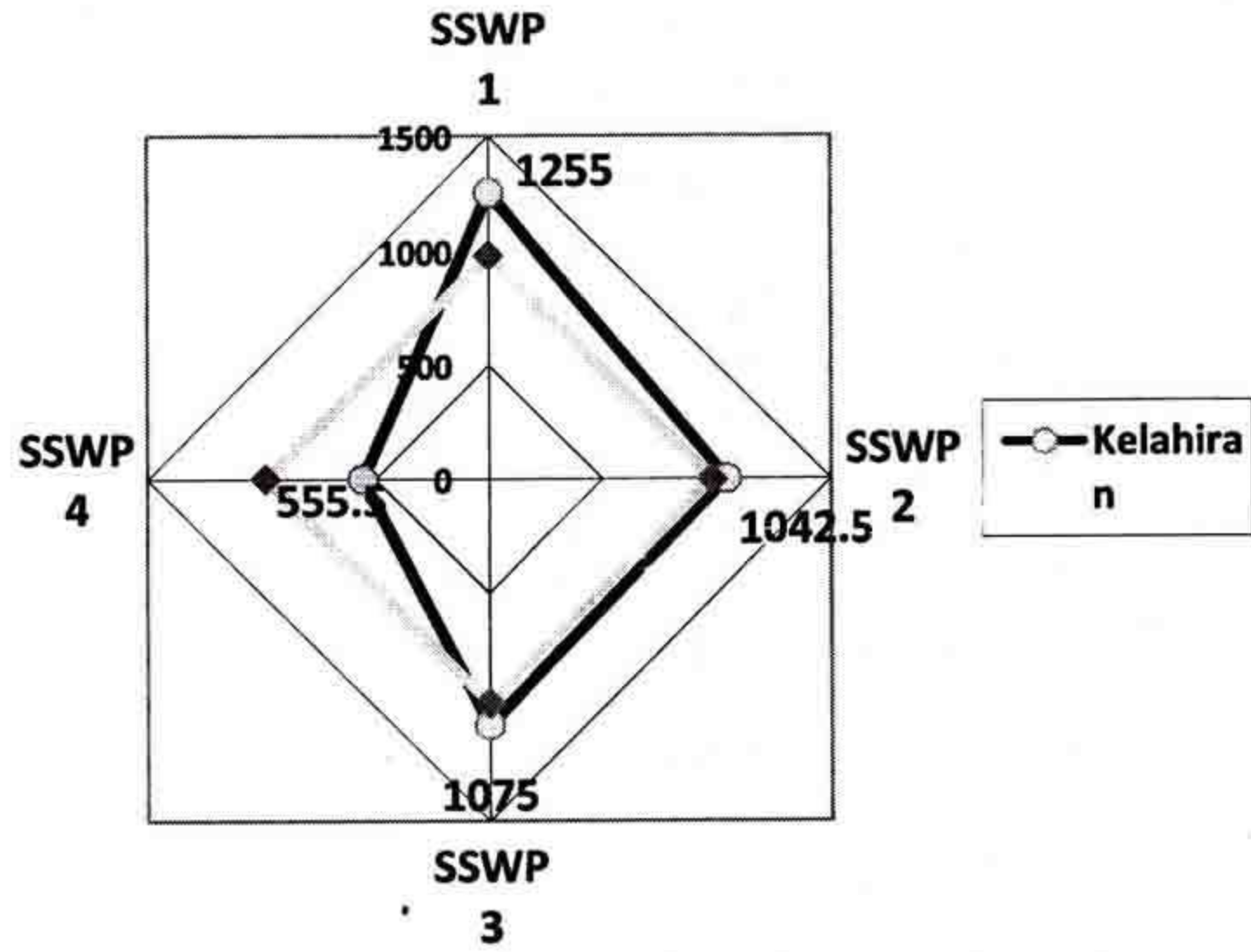
Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi ; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan

penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

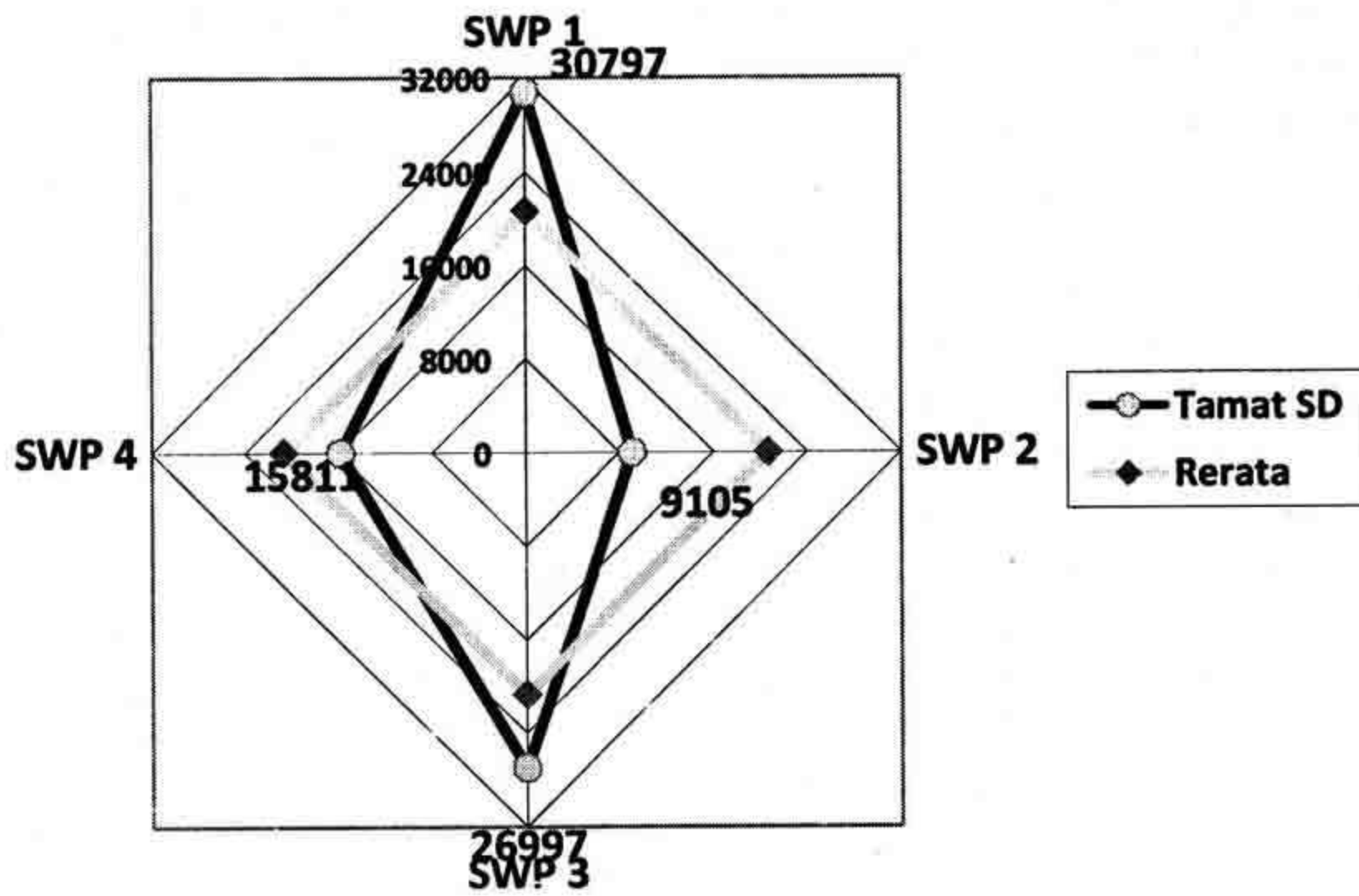
Berdasarkan diagram, tampak bahwa SSWP 1 (Gambar 5) memiliki jumlah penduduk tengah tahun 2012 tertinggi yang mencapai 279.404. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan sumber daya manusia dan potensi tenaga kerja yang dalam struktur pasar kerja. Disisi lainnya juga merupakan potensi pasar yang signifikan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang sangat besar juga berpotensi menimbulkan masalah lainnya. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk di SSWP 1 karena tingkat kelahiran yang relatif tinggi (Gambar 4.2).



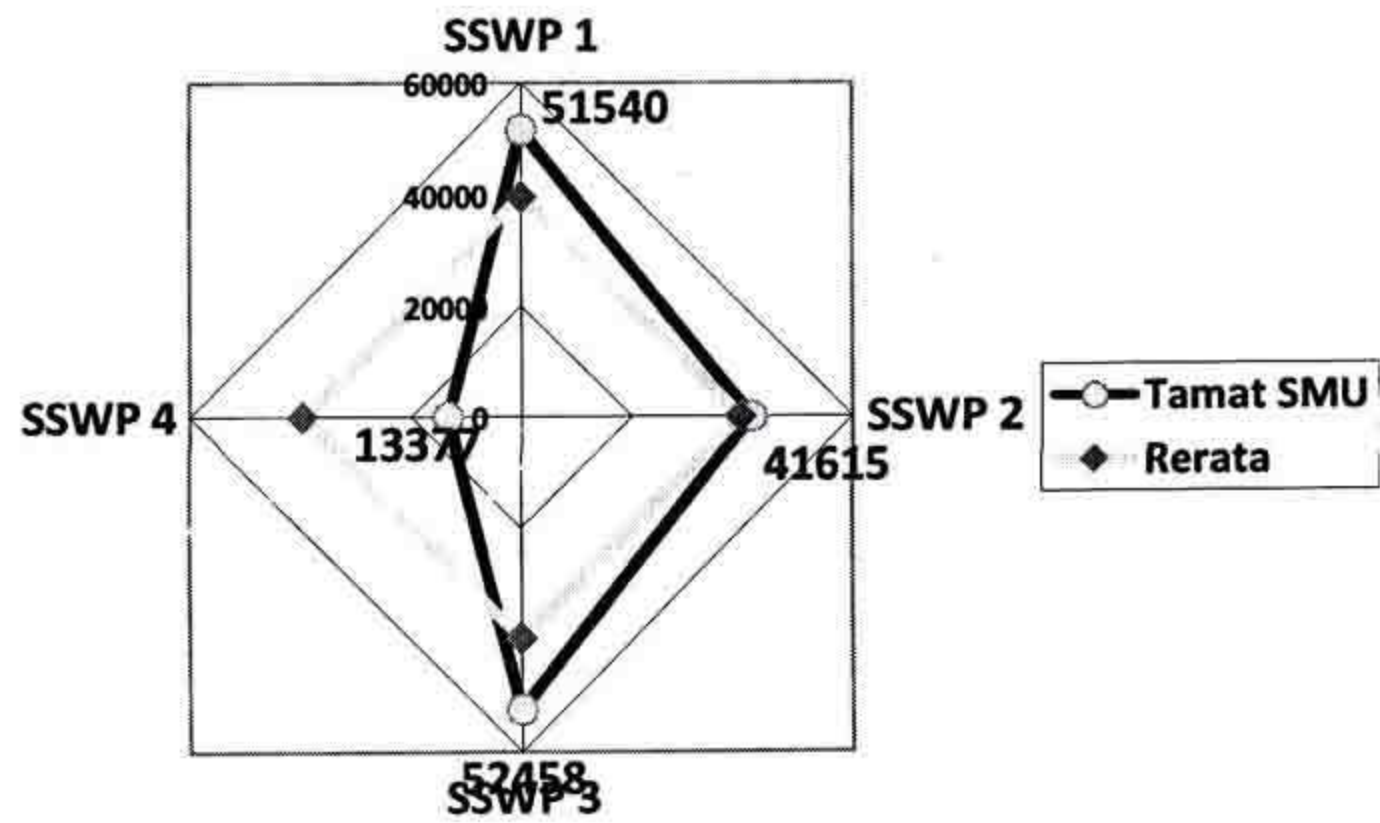
Gambar 5. Jumlah Penduduk Tengah Tahun 2012



Gambar 6. Jumlah Kelahiran Tahun 2012



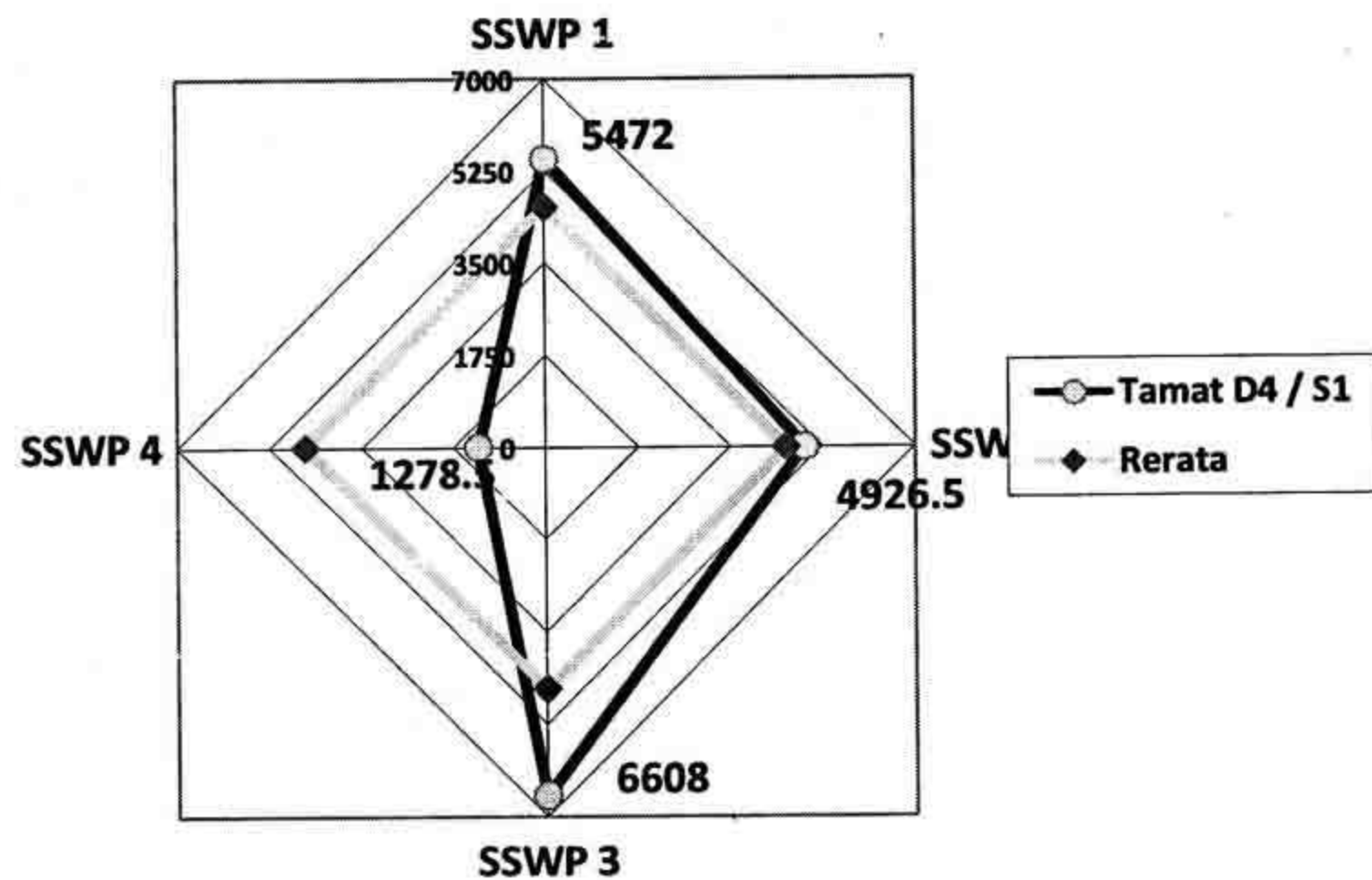
Gambar 7. Jumlah Penduduk yang Lulus SD Tahun 2012



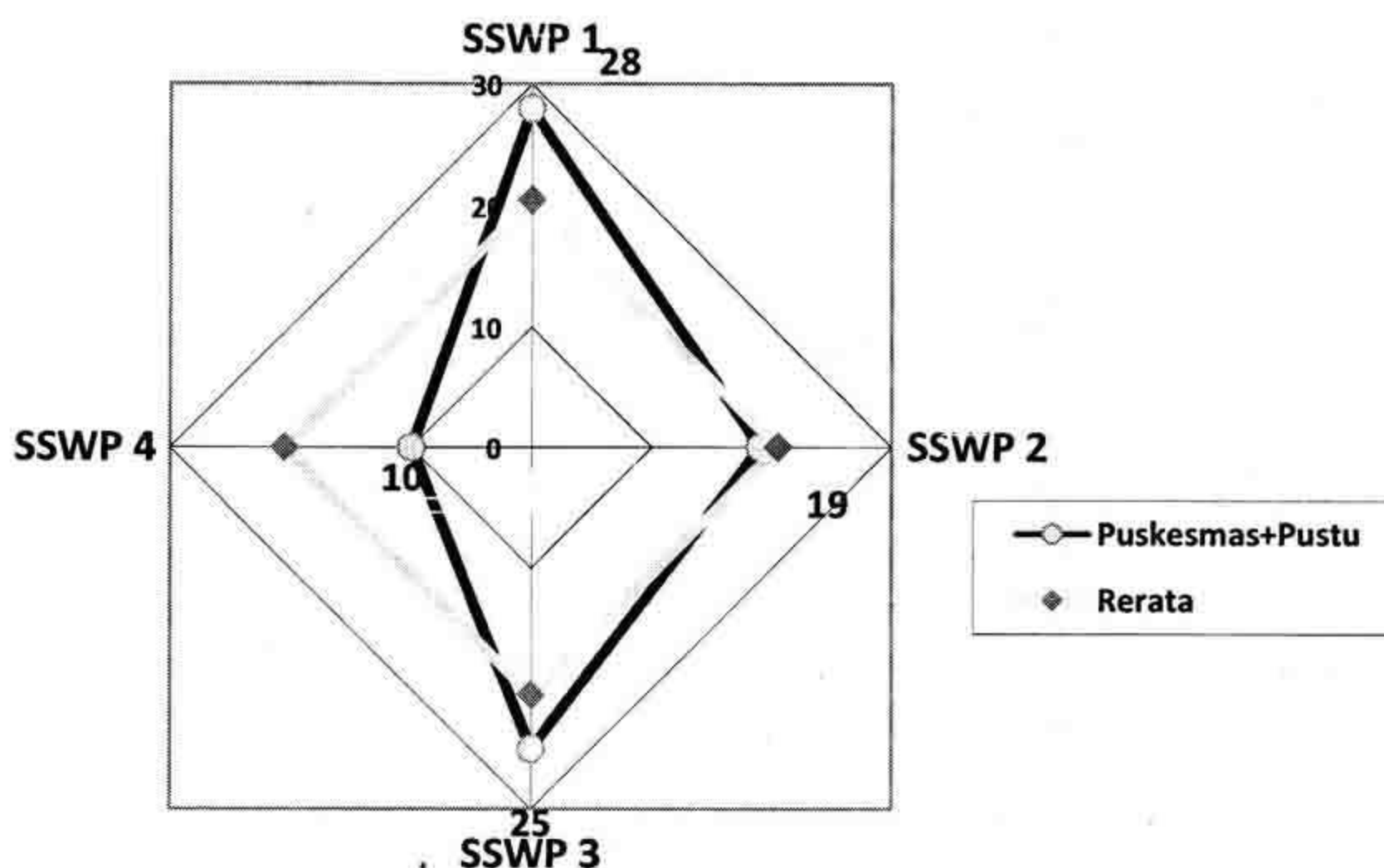
Gambar 8. Jumlah Penduduk Yang Tamat SMA Tahun 2011

Jumlah penduduk yang tinggi di SSWP 1 ternyata juga dibarengi dengan jumlah penduduk yang lulus SD (Gambar 7) yang juga menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan tiga

SSWP lainnya. Demikian juga SSWP 2 justru menempati posisi paling sedikit dibandingkan dengan SSWP lainnya, padahal jumlah penduduk SSWP 2 merupakan peringkat 3.



Gambar 9. Jumlah Penduduk Yang Tamat Strata 1 Tahun 2011



Gambar 10. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2011

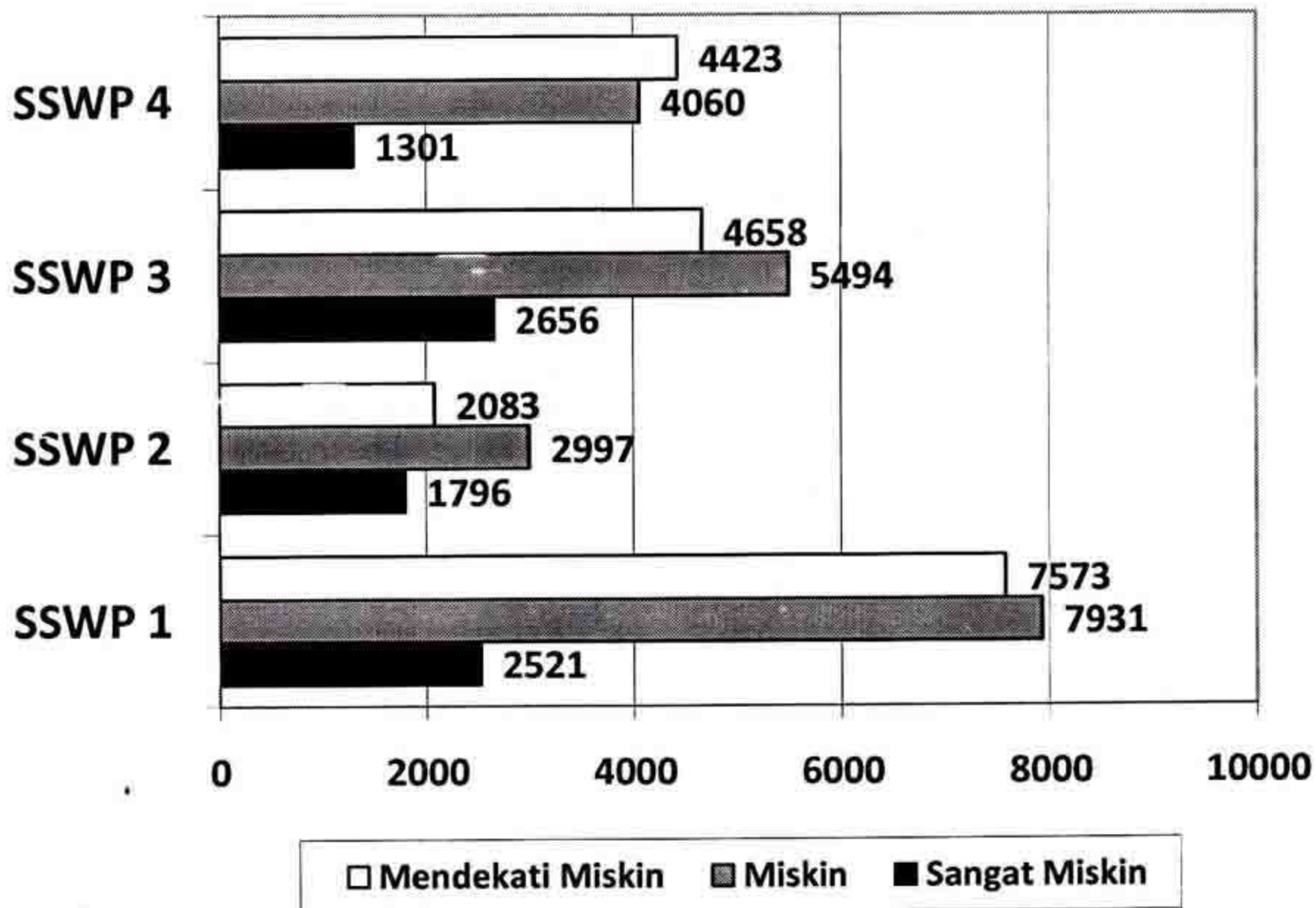
Hal yang menarik justru terjadi pada jumlah penduduk lulusan SMA (sederajat) (Gambar 8) karena SSWP 1 yang jumlah penduduknya terbanyak justru lebih sedikit dibandingkan dengan SSWP 2. Sementara SSWP 4 justru jumlahnya paling sedikit. Hal tersebut disebabkan karena jumlah sekolah menengah atas di SSWP 2 dan 4 hanya 3 sekolah, sementara di SSWP 3 mencapai 13 sekolah. Hal ini menunjukkan dibutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan di SSWP 1, 2 dan 4.

Demikian juga pada jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Strata 1 (Gambar 9) ternyata juga paling banyak di SSWP 3, yaitu Kec. Dolopo 1.767 jiwa ; Kec. Geger 1.975 jiwa ; Kec. Dagangan 1.231 jiwa dan Kec. Kebonsari 1.635 jiwa.

Dari aspek kesehatan, tampak bahwa puskesmas dan posyandu

merupakan ujung tombak bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa di SSWP 1 jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terbanyak dibandingkan dengan tiga SSWP lainnya yaitu sejumlah 28 unit, hanya saja jumlahnya tidak terlalu banyak bila dibandingkan SSWP 3 sejumlah 25 unit. Yang paling sedikit adalah SSWP 4 sejumlah 10 unit.

Bilamana dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka di SSWP 1 setiap Puskesmas+Pustu harus melayani 10.621 jiwa ; SSWP 2 sejumlah 8.726 jiwa ; SSWP 3 sejumlah 8.949 jiwa dan SSWP 4 sejumlah 10.501 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah puskesmas+pustu di SSWP 1 terbanyak namun ternyata setiap puskesmasnya harus melayani penduduk dengan perbandingan terbanyak.

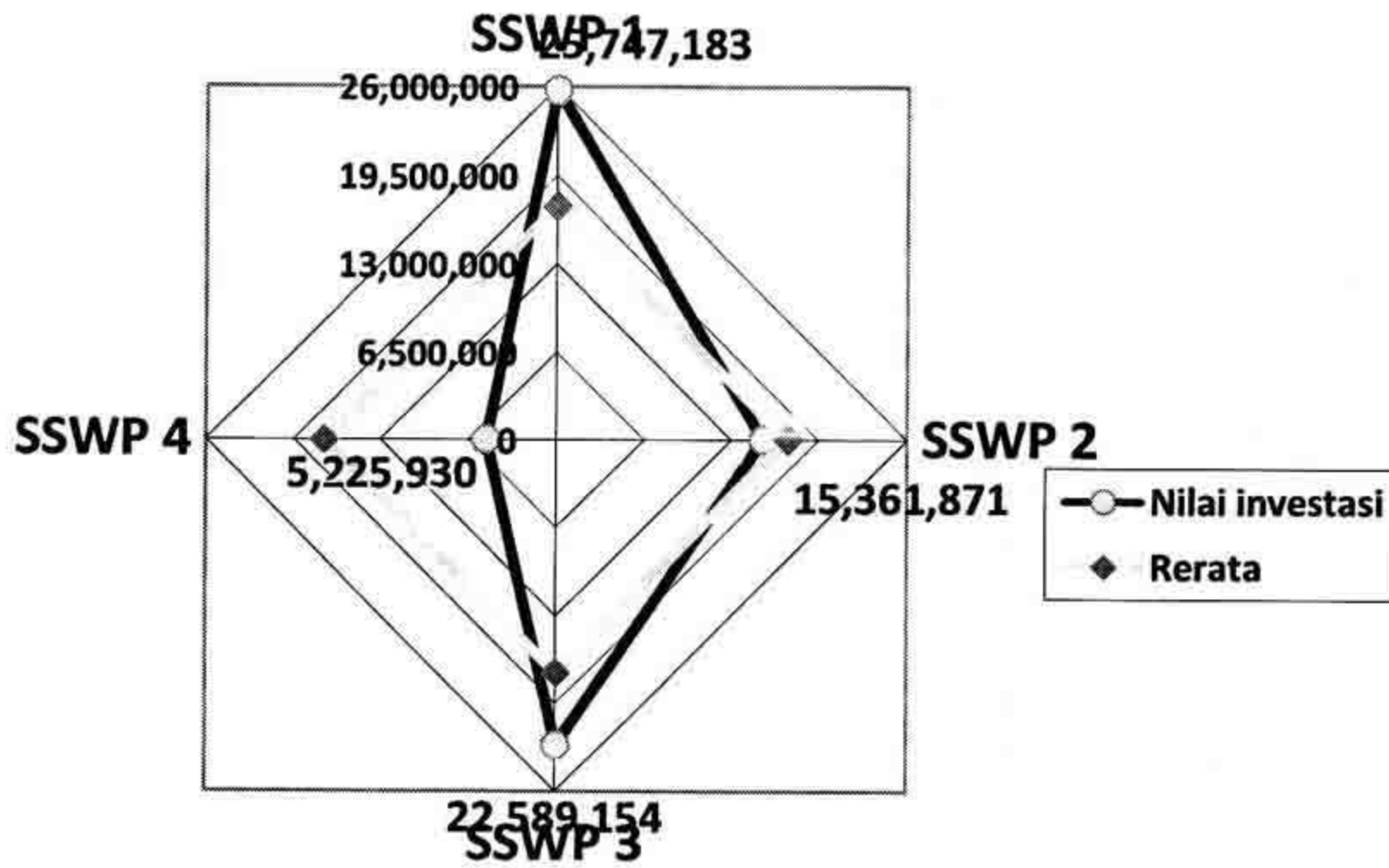


Gambar 11. Indikator Kemiskinan Tahun 2011

Dalam hal jumlah penduduk miskin (Gambar 11), ternyata SSWP 1 yang memiliki jumlah penduduk tertinggi juga memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Tidak kurang tercatat 2.521 penduduk sangat miskin ; 7.931 penduduk miskin dan 7.573 penduduk mendekati miskin.

Masalah ini harus segera ditindaklanjuti karena salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan eko-

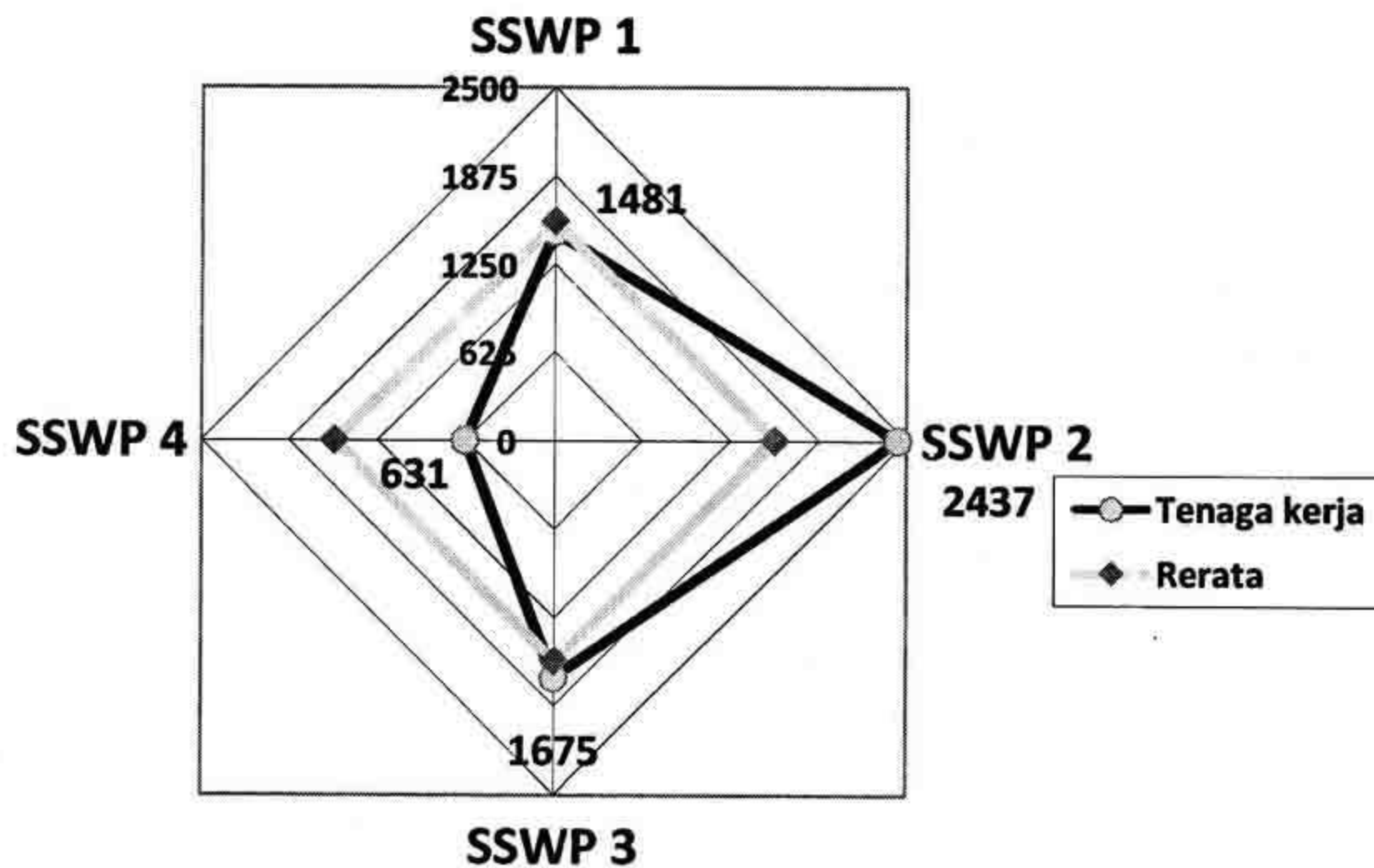
nomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya.



Gambar 12. Jumlah Investasi Industri Formal Tahun 2011 (Dalam Ribuan Rupiah)

Berdasarkan data nilai investasi industri formal di seluruh SSWP (Gambar 12), tampak bahwa SSWP 1 merupakan tempat yang memiliki jumlah tertinggi dengan nilai total Rp 25.747.183.000, khususnya di Kecamatan Pilangkenceng sejumlah Rp 6.958.750.000, namun bilamana dilihat per kecamatan maka Kec. Dolopo dan

Kec. Geger merupakan dua kecamatan dengan tingkat investasi yang paling tinggi yaitu sejumlah Rp 9.741.852.000 (Kec. Dolopo) dan RP 7.152.931.000 (Kec. Geger). Sementara jumlah paling sedikit berada di SSWP 4 yaitu Rp 5.225.930.000, dengan Kecamatan Gemarang hanya sejumlah Rp. 718.800.000



Gambar 13. Jumlah Tenaga Kerja Industri Formal Tahun 2011

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, SSWP 2 merupakan sentral tenaga kerja formal di Kab. Madiun karena terdapat 2.437 orang. Hal tersebut menarik karena SSWP 1 yang memiliki jumlah penduduk terbesar hanya mampu menyerap 1.481 orang. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lanjutan terkait dengan kondisi pasar kerja di SSWP 1 dan 2 agar pasar kerja dapat berkembang sehingga penyerapan tenaga kerja dapat terus berkembang.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

- a) SSWP 1 memiliki jumlah penduduk tengah tahun 2012 tertinggi yang mencapai 279.404. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan sumber daya manusia dan potensi tenaga kerja yang dalam struktur pasar kerja. Disisi lainnya juga merupakan potensi pasar yang signifikan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang sangat besar juga berpotensi menimbulkan masalah lainnya. Salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk di SSWP 1 karena tingkat kelahiran yang relatif tinggi
- b) Berdasarkan data, tampak adanya ketidakmerataan jumlah lulusan SMP dan SMA yang masih terkonsentrasi di SSWP 1 dan 3.
- c) Bilamana dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka di SSWP 1 setiap Puskesmas + Pustu harus melayani 10.621 jiwa ; SSWP 2 sejumlah 8.726 jiwa ; SSWP 3 sejumlah 8.949 jiwa dan SSWP 4 sejumlah 10.501 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah puskesmas + pustu di SSWP 1 terbanyak namun ternyata setiap puskesmasnya harus melayani penduduk dengan perbandingan terbanyak.
- d) Dalam hal jumlah penduduk miskin, ternyata SSWP 1 yang memiliki jumlah penduduk tertinggi juga memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Tidak kurang tercatat 2.521 penduduk sangat miskin ; 7.931 penduduk miskin dan 7.573 penduduk mendekati miskin.
- e) Berdasarkan data nilai investasi industri formal di seluruh SSWP, tampak bahwa SSWP 1 merupakan tempat yang memiliki jumlah tertinggi dengan nilai total Rp 25.747.183.000, khususnya di Kecamatan Pilangkenceng sejumlah Rp 6.958.750.000, namun bilamana dilihat per kecamatan maka Kec. Dolopo dan Kec. Geger merupakan dua kecamatan dengan tingkat investasi yang paling tinggi yaitu sejumlah Rp 9.741.852.000 (Kec. Dolopo) dan Rp 7.152.931.000 (Kec. Geger). Sementara jumlah paling sedikit berada di SSWP 4 yaitu Rp 5.225.930.000, dengan Kecamatan Gemarang hanya sejumlah Rp. 718.800.000

### Rekomendasi

- a) Perlunya dilakukan usaha pengaturan jumlah kelahiran melalui peningkatan usaha Keluarga Berencana agar tingkat kelahiran dapat dikendalikan sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat dikendalikan. Langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintensifkan kegiatan KB dan penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi pasangan sah di puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.
- b) Perlunya dipertimbangkan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan, karena di seluruh SSWP yang menjadi ujung tombak adalah puskesmas dan puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh



- SSWP hingga ke pelosok kecamatan.
- c) Ketidakmerataan jumlah penduduk yang lulus SMP dan SMA (sederajat) dapat dikurangi dengan menyediakan sarana pendidikan SMP dan SMA, terutama di SWP 4 yang hanya memiliki 7 SMP.
- d) Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Peningkatan program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat.
- e) Guna meningkatkan nilai investasi maka perlu penguatan lembaga perijinan yang saat ini masih berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (berdasar Perda No. 14 th 2011) agar dapat lebih berperan dalam usaha mempermudah regulasi perizinan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :
- Sistem jemput bola
  - Pengembangan profil investasi online
  - Peningkatan kualitas SDM dengan diklat dari BKPM

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Kadariah. 1982. *Ekonomi Perencanaan*, Jakarta: LP FEUI.
- Rosyidi, Suherman. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: LP FEUI.
- Surjadi. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Alumni
- Taliziduhu, Ndaha. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development*. Seventh edition. London: Addison Wesley Longman.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers,